

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP, MOTTO, DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan/Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perilaku	7
2.2 Akuntansi Keperilakuan	8
2.3 Pengertian Perilaku Manusia dan Hubungannya dengan Keperibadian	10
2.4 Aspek-aspek Penting dalam Keperilakuan	11
2.5 Faktor Personal yang Mempengaruhi Perilaku Manusia	13
2.6 Standar Akuntansi Pemerintahan	15
1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	16
2. Akuntansi Pendapatan	18
3. Akuntansi Belanja	18
2.7 Laporan Keuangan Pemerintah	19
1. Kualitas Laporan Keuangan	20
2. Tujuan Laporan Keuangan	22
3. Komponen Laporan Keuangan	23
2.8 Akuntansi Basis Akrual	30
2.9 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	35
2.10 Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual	35
2.11 Dasar Hukum Akuntansi Berbasis Akrual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	37

3.3	Sumber Data	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5	Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum	39
1.	Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	39
2.	Organisasi Instansi	39
3.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40
4.	Visi dan Misi Instansi	46
5.	Aktivitas Operasional Instansi	46
6.	Klasifikasi Pegawai	48
4.2	Hasil Penelitian	23
1.	Pendapatan	49
2.	Belanja	49
3.	Siklus dan Prosedur Pengeluaran Belanja Dinas PPKAD	50
4.	Penyusutan Aset Tetap	30
5.	Penghentian Penggunaan Aset Tetap	35
6.	Penyajian Aset Tetap di Neraca Perusahaan	36
4.3	Hasil Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan di dunia pemerintah yang dilandasi oleh politik telah mempengaruhi akuntan pemerintah melakukan perilaku tidak etis yang dapat merugikan masyarakat, yang di pengaruhi oleh kekuasaan. Perilaku tidak etis dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan fakta dan bersifat materil yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengambil kepentingan pribadi maka dapat dikatakan sebagai pelaku tidak etis. Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap professional yang mengabdikan pada suatu bidang pekerjaan tertentu, contohnya dalam bidang akuntansi. Kode etik resmi bagi professional akuntansi adalah kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan ini merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan Negara seperti yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan Negara. Selain itu, Perubahan dibidang akuntansi juga harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan Pemerintah. Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan di gunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal, dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada

pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dimana Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi di akui, dicatat dan di sajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia adalah hal yang baru. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum dan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) termasuk Bagan Akuntansi Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Basis Pencatatan dalam akuntansi Pemerintahan pada awalnya menggunakan basis kas. Kemudian basis ini dirubah menjadi basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ini dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bisa lebih akurat, relevan dan dapat lebih transparan, karena dianggap akuntansi berbasis kas tidak transparan karena akuntansi ini

hanya memunculkan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas, sedangkan akuntansi berbasis akrual tidak memperhatikan kas ataupun setara kas, akuntansi ini juga mencatat transaksi-transaksi saat terjadinya peristiwa, bukan saja saat ada kas yang masuk atau keluar. Sehingga dianggap lebih dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Perilaku yang tidak etis dapat menyebabkan penerapan SAP berbasis Akrual tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan pengendalian internal dan monitoring oleh atasan/pimpinan kantor, agar kecurangan dalam proses pelaporan keuangan dapat dihindari. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, di perlukan pengawasan internal kontrol yang efektif. Dengan adanya internal efektif dapat menutup peluang terjadinya perilaku tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang.

Setiap pemerintahan umumnya menerapkan etika yang harus dipatuhi oleh para pegawai dan pimpinannya, termasuk salah satunya lembaga yang bergerak dibidang pemerintahan. Namun banyak yang sering ditemui bahkan perilaku pegawai banyak yang melanggar aturan-aturan, dan tidak jarang ada oknum-oknum yang tidak melaksanakan etika dan aturan yang ditetapkan oleh instansi dengan berbagai alasan. Perilaku seperti itu lah yang di sebut dengan perilaku yang tidak etis. Dimana perilaku tidak etis adalah gejala-gejala dari timbulnya kecurangan dalam kantor.

Kesiapan pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010 biasanya tidak lepas dari tiga hal yaitu informasi, perilaku, dan keterampilan. dimana informasi meliputi sosialisasi tentang sistem akuntansi basis akrual. dengan adanya sosialisasi tersebut di harapkan dapat melakukan pelatihan untuk SDM tentang perangkat lunak (*IT based system*), sehingga kompetensi SDM dapat berpengaruh positif terhadap kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual tersebut. selain itu juga yang harus disiapkan adalah perilaku, dimana perilaku memiliki peran yang penting bagi kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. hal ini ditunjukkan dari keengganan pegawai bagian keuangan untuk menyesuaikan diri dan kompetensinya dengan tuntutan perubahan sistem tersebut. hal yang ketiga adalah keterampilan. setiap pegawai harus memiliki keterampilan yang tinggi agar mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. dan yang paling penting dalam hal ini agar

terwujudnya sistem tata kelola pemerintah yang baik adalah semua tergantung pada perilaku dari pemimpin dan juga seluruh sumber daya manusia yang terkait di dalam organisasi/instansi tersebut.

Dinas PPKAD Kabupaten Talaud yang beralamat di Jl. Buibatu Kompl. Perkantoran Pemda Talaud-Melonguane, Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang bergerak dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Didirikan dengan tujuan Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. selain itu juga mempunyai tujuan untuk Meningkatkan Kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Setiap LKPD yang memenuhi empat kriteria ini dianggap telah mempertanggungjawabkan anggarannya dengan benar, dan pertanggungjawaban ini diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. LKPD yang disajikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung adanya pengelolaan yang akuntabilitas dan terbuka dalam rangka menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Agar tata pemerintahan bisa berjalan dengan baik, maka pemda harus Taat terhadap aturan-aturan ataupun standar berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik yang berpengaruh terhadap etika individual. Salah satu ketaatan akuntansi diimplikasikan dalam ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan, namun nyatanya pembuatan laporan keuangan tidak dapat selesai tepat waktu dikarenakan ada perilaku-perilaku tidak etis yang ditemui sehingga menyebabkan keterlambatan dari para pegawai dalam membuat laporan keuangan tidak dapat selesai tepat waktu. oleh sebab itu Perlunya kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas yang telah menjadi tanggung jawab setiap staf PPKAD adalah merupakan hal yang harus diperhatikan agar laporan keuangan dapat terselesaikan tepat waktu. Selain itu, perilaku tidak etis yang sering di lakukan oleh para pegawai adalah mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Perilaku ini dalam waktu sehari-hari dapat dilihat dari kedisiplinan waktu masuk dan istirahat yang tidak sesuai dengan semestinya serta keterlambatan memasukan data-data dari SKPD sehingga dalam pelaporan keuangan mengalami keterlambatan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, dan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kabupaten talaud belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sepenuhnya, ini dikarenakan dalam proses pelaporan keuangan masih mengalami keterlambatan dan tidak tepat waktu akibat masih terbatasnya sumber daya manusia pada SKPD yang belum mahir atau tidak berkompeten dalam bidangnya yang belum memahami akuntansi pemerintahan. Selain itu, setiap pegawai juga belum sepenuhnya bisa menguasai setiap aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi dan keterlambatan penetapan perda APBD dan penyusunan LKPD oleh pimpinan.

Agar bisa berjalan dengan baik, perlu adanya perubahan sikap dan perilaku dalam pemerintah daerah talaud, dimana perilaku pemerintah daerah dalam tahap menerapkan SAP Berbasis akrual memiliki peranan penting dalam kesiapan menghadapi perubahan ini khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangan. demi terwujudnya keberhasilan suatu pemerintahan daerah, semua tergantung dari perilaku seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan atas perubahan yang terjadi agar Pelaporan Keuangan PPKAD dapat berjalan dengan baik terkait dengan penerpan SAP berbasis Akrual ini.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana perilaku pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PPKAD menerapkan SAP basis akrual atas laporan keuangan. Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERILAKU PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) KABUPATEN TALAUD”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Perilaku Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap pelaporan keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Talaud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang Perilaku Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar terhadap pelaporan keuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Talaud.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis : untuk menambah pengetahuan tentang Perilaku dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar dalam pelaporan keuangan secara tepat dengan membandingkannya dengan teori yang di peroleh di bangku perkuliahan.
2. Bagi Akademik : Memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, agar ke depan lebih mengimplementasikan kebutuhan pendidikan, khususnya jurusan akuntansi.
3. Bagi Instansi : Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud untuk memperbaiki perilaku dan kinerja terhadap pelaporan keuangan yang ada pada Pemerintah daerah khususnya di Dinas PPKAD Kabupaten Talaud.